

**MULTIKULTURALISME DAN PLURALISME AGAMA:
Studi Kasus Kerusuhan Kupang 30 November 1998**

**Oleh
Yoseph Andreas Gual**

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan daerah kepulauan atau Indonesia mini. NTT memiliki 1.192 pulau (LOCALISE SDGs in Indonesia, 2018), 432 bernama, 134 belum diberi nama, 42 pulau dihuni oleh 16 suku asli dengan 69 bahasa daerah. NTT juga berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timor Leste dan Australia. Situasi geografis NTT ini memungkinkan NTT memiliki banyak kekayaan budaya yang variatif namun belum sepenuhnya ditelusuri dan dimanfaatkan untuk pembangunan manusia dan daerah. Di sisi lain, realitas geografis yang sama menjadi semacam kutukan bagi NTT dalam hal pembangunan. Hal ini terbukti, pada September 2021, Badan Pusat Statistik mengkategorikan NTT sebagai salah satu provinsi termiskin atau urutan ketiga termiskin dengan 20,44% di Indonesia (BPS, 2021). Kutukan lain yang dirasakan oleh NTT akibat multikulturalisme ini adalah potensi konflik sangat mungkin terjadi kapan saja jika keanekaragaman masyarakat ini tidak dikelola dengan sebaik-baiknya.

Kota Kupang sebagai ibu kota dan menjadi pusat perekonomian dan pendidikan di provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan tempat tujuan hampir semua warga NTT yang ada di berbagai kabupaten maupun luar NTT. Hal ini membuat warga NTT sangat beragam dan dinamis. Meskipun menjadi pusat ibu kota provinsi dan kota, pendidikan dan ekonomi di NTT, Kota Kupang pernah mengalami kerusuhan rasial khususnya terkait agama yang sangat mencorong dan melukai kehidupan masyarakat Kota Kupang dan masyarakat NTT secara umumnya.

Kerusuhan Kupang, 30 November 1998

Kerusuhan Kupang diawali ketika sejumlah organisasi pelajar/mahasiswa Kristen Kupang, minggu ketiga November 1998 melakukan aksi Hari Berkabung

sebagai bentuk solidaritas terkait kerusuhan anti Kristen, pengrusakan dan pembakaran gereja di Ketapang Jakarta Pusat (Aziz, 2019). Hari berikutnya massa bergerak menuju kampung Oesapa yang dihuni orang-orang Bugis, merusak atau membakar beberapa masjid, fasilitas Pendidikan, dan banyak rumah (S-20/BP/S-12/A-6/N-1, 1998).

Dari penelusuran yang dikumpulkan oleh aparat keamanan ditemukan bahwa kerusuhan Kupang diprovokasi oleh pihak luar daerah yang ingin mengadu domba masyarakat beragama dengan memanfaatkan konflik di luar NTT (S-20/BP/S-12/A-6/N-1, 1998), (Aziz, 2019). Upaya adu domba itu ternyata berhasil membuat kerusuhan rasial yang sangat membekas pada masyarakat Kota Kupang dan NTT secara keseluruhan. Dampak lanjut dari kerusuhan tersebut terlihat jelas dari sisi ekonomi, keamanan dan kerekatan sosial.

Situasi Terkini Kota Kupang

Setelah 24 tahun kerusuhan rasial di Kupang, saat ini Kota Kupang masuk dalam 10 besar kota yang paling toleran terhadap agama lain dari 94 kota se-Indonesia versi Setara Institute. Selama tiga tahun berturut-turut Kota Kupang masuk dalam 10 kota paling toleran di Indonesia – tahun 2018 di urutan 7 dengan skor 5.857 (Adhi, 2018), tahun 2020 di urutan 5 dengan skor 6.037 (Riana, 2021), dan tahun 2021 berada di urutan 4 dengan skor 6.337 (Permana, 2022). Penilaian Setara Institut ini dilakukan dengan menggunakan delapan indikator penilaian yakni rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya, kebijakan diskriminatif, pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi, tindakan nyata terkait peristiwa, peristiwa intoleransi, dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi, heterogonitas keagamaan penduduk dan inklusi sosial keagamaan (Chyntia, 2021).

Raihan Kota Kupang masuk sepuluh besar kota yang paling toleran dalam bidang agama di Indonesia sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah ada dan berhasil dikembangkan oleh masyarakat, pemangku kepentingan dan

pemerintah. Faktor utama yang dimiliki oleh masyarakat Kota Kupang adalah kearifan lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur (Aziz, 2019).

Masyarakat Kota Kupang berasal dari seluruh wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki beragam bahasa, kebiasaan, budaya, adat istiadat, agama dan cara pandang hidup bersama yang berbeda. Karena situasi yang berbeda inilah sejak awal masyarakat NTT bisa menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan yang tidak bisa ditolak. Perbedaan bukanlah sesuatu yang perlu diseragamkan melainkan sebagai bagian dari realitas hidup yang perlu ditata untuk menghasilkan harmoni dan kebaikan bersama.

Kearifan lokal lain yang berkembang dalam masyarakat NTT adalah pandangan mereka yang melihat darah yang mengalir dalam diri seseorang dan sesamanya merupakan hal utama dan pertama yang diterima yang termanifestasi dalam adat istiadat ketimbang agama. Oleh karena itu, masyarakat adat di NTT lebih mendahulukan adat dari pada agama jika diperhadapkan keduanya. Adat menyatukan masyarakat jika agama membedakan manusia. Hal ini kelihatan dari segala tata laksana hidup manusia NTT yang selalu dimulai dengan adat. Misalnya, pernikahan manusia NTT terbagi dalam tiga bagian pernikahan. Pernikahan pertama dilangsungkan dalam ritual adat setelah itu agama dan kemudian administrasi negara.

Kearifan lokal semacam inilah yang dibawa masyarakat dari berbagai daerah ke Kota Kupang di mana mereka menetap dan mewarnai cara manusia Kota Kupang melihat perbedaan dan hidup dengan perbedaan tersebut.

Faktor lain yang membuat masyarakat Kota Kupang bisa hidup secara toleran dengan agama lain karena peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Peran FKUB NTT dalam membangun toleransi umat beragama di Kota Kupang dilakukan dengan program rutin dalam bentuk dialog, seminar, sosialisasi, lomba pidato serta lomba hyme dan mars kerukunan, program tidak rutin dalam bentuk penerbitan buku, pembuatan striker, kalender dan spanduk keagamaan (Taopan et al., 2020). Untuk mendorong terlaksana kehidupan toleransi antarumat beragama di Kota Kupang, FKUB NTT pun mengalami halangan dan hambatan seperti terbatas rapat, komunikasi dan fasilitas namun kelompok pemuka agama ini berupaya menjembatannya dengan

melakukan diskusi antarbadan pengurus, berkomunikasi dengan pemerintah, melakukan sosialisasi internal dan memanfaatkan dana sebaik mungkin sambil mengajukan berbagai proposal yang bertujuan mengembangkan kehidupan toleransi di Kota Kupang.

Dari penelitian lain ditemukan bahwa faktor-faktor yang mendukung masyarakat Kota Kupang bisa hidup rukun dan toleran dengan orang lain yang berbeda karena beberapa faktor ini: (1) geneologis, (2) peran pemuka agama, (3) masyarakat yang sadar sosial dan (4) peran tempat ibadah (Made & Sena, 2020). Faktor geneologis berkaitan dengan hubungan persaudaraan yang dimiliki oleh para pemeluk agama. Realitas keluarga di NTT dan Kota Kupang adalah satu keluarga inti atau keluarga besar, anggota keluarganya bisa memeluk agama yang berbeda namun tidak menimbulkan penolakan apalagi konflik. Hal tersebut merupakan pilihan pribadi yang harus dihormati anggota keluarga lain. Pilihan beragama adalah pilihan pribadi karena itu perlu dihormati dan tidak boleh ditolak pribadi tersebut dari keluarga.

Dalam masyarakat NTT, tokoh agama sangat dihormati. Karena itu, tokoh agama terdorong untuk menjadi suri teladan bagi umatnya dengan cara menerima perbedaan sebagai cara hidup bersama yang paling baik dalam hidup bermasyarakat yang majemuk seperti di Kota Kupang. Ketokohan pemimpin agama dijalankan dengan memberikan pembinaan dan pengajaran yang menyejukan bagi umatnya. Tokoh agama menjadi teman bagi umat yang menerima usulan umatnya yang akan diteruskan kepada pemuka agama lain atau umat dari agama lain dan pemerintah.

Kesadaran sosial masyarakat Kota Kupang tentang realitas hidup bersama yang heterogen dalam semua aspek membuat masyarakat Kota Kupang tidak hanya bersimpati kepada yang berbeda melainkan juga mengembangkan sikap empati dalam hidup bersama. Empati tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan kepada umat yang berbeda dalam kehidupan keseharian dan moment-moment hari raya tiap agama.

Di Kota Kupang tempat beribadah memiliki berbagai fungsi yakni pembinaan karakter termasuk karakter untuk bisa hidup bersama dengan orang yang berbeda agama, suku dan pandangan. Rumah ibadah juga berfungsi sebagai tempat sosial di

mana umat beragama bisa mengatasi konflik bersama dengan saling bertemu dan berdialog. Rumah ibadah juga berfungsi sebagai tempat pendidikan di mana nilai-nilai luhur hidup bersama disampaikan dan diregenerasikan selain ajaran agama.

Penelitian lain menemukan bahwa masyarakat Kota Kupang bisa hidup berdampingan secara rukun dan damai dalam segala perbedaan dibalut oleh kerja sama dalam pembangunan tempat ibadah, perayaan hari besar agama dan dalam kegiatan politik (Sodli, 2009). Kerja sama-kerja sama ini didorong oleh faktor ajaran agama, pemerintah dan pemimpin agama.

Proyeksi Masa Depan

Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, setiap orang bisa bertemu dengan realitas multikultural di mana saja. Saat seseorang membuka aplikasi Tiktok ia bisa bertemu dengan berbagai adegan singkat dari berbagai manusia dari berbagai pelosok dunia. Dengan aplikasi MolaTV, seseorang bisa berinteraksi dengan siapa saja dari seluruh belahan dunia kapan dan di mana saja menggunakan beragam bahasa. Dengan membuka Youtube, orang bisa menonton berbagai video blog dari berbagai penjuru dunia dengan beragam tema dengan beragam bahasa dan etnis di dalamnya.

Dengan kemajuan transportasi, setiap orang bisa menempati beberapa lokasi dan bertemu dengan beragam manusia dari berbagai etnis, suku dan agama dalam waktu beberapa jam saja. Seseorang bisa makan di Kupang, mandi di Solo, kerja di Jakarta lalu tidur di Makasar dalam waktu sehari. Dalam mobilitas yang kian cepat semacam ini, pertemuan dengan orang yang berbeda menjadi sangat lumrah. Orang tidak lagi bisa bersembunyi dari realitas kemajemukan.

Bagi mereka yang bisa menerima dan hidup dalam kemajemukan akan melakukan lompatan fisik dari satu dunia fisik ke dunia fisik lain yang berbeda dengan sangat mudah. Mobilitas fisik mereka ini akan mempengaruhi cara pandang mereka dalam melihat kehidupan yang pada gilirannya akan mempengaruhi empati mereka terhadap kehidupan yang berbeda dan pada akhirnya mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam membangun kehidupan yang beragam dengan penuh pengharapan.

Namun bagi mereka yang menolak keberagaman akan mengambil langkah-langkah isolasi. Mereka yang memaksa untuk menolak realitas keberagaman akan terjebak dalam dua kemungkinan dari upaya purifikasi diri dan kelompoknya. Pemurnian diri ini bisa saja mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat yang berbeda seperti suku-suku pedalaman yang masih ada di Indonesia (Suku Boti, Punan Tubu, Topo Uma, Orang Rimba, Orang Badui). Konsekwensi bagi mereka ini yakni tidak menerima berbagai kemajuan dan hidup berdasarkan cara hidup tradisional yang mereka miliki. Pemurnian lain adalah dengan tetap hidup bersama dalam keberagaman namun anti dengan orang yang berbeda dengannya. Kelompok ini bisa bertindak brutal bila titik perbedaan ini tidak bisa lagi mereka terima/tolerir atau mereka anggap sudah sangat keterlaluhan berdasarkan standar yang mereka pegang. Kelompok ini terwakilkan oleh kaum teroris.

Dunia yang makin global dengan segala kemungkinan pluralitas ini memaksa orang untuk berpikir bagaimana menghasilkan manusia yang bisa hidup dengan realitas kemajemukan. Cara utama untuk mendidik manusia agar menerima keberagaman yakni dimulai sejak awal seorang anak dilahirkan di dunia (Liliweri, 2009). Keluarga menjadi tempat pertama, utama dan terutama bagi pendidikan anak untuk mengenal berbagai manusia dengan cara hidupnya yang berbeda. Keluarga memiliki peran besar memberikan pijakan dasar bagaimana seseorang bisa mengerti, memahami, menerima dan hidup dengan orang yang berbeda dari dirinya. Tanpa pendidikan keluarga yang terarah pada pemahaman akan perbedaan, seorang anak akan bertumbuh dengan pemahaman yang keliru akan kemajemukan atau malah menjadi pribadi intoleran.

Tempat kedua yang sangat penting untuk memperkenalkan realitas hidup yang majemuk adalah sekolah. Sekolah seyogyanya mengembang kurikulum dan pola hidup yang menghormati keberagaman. Kurikulum sekolah baik di tingkat SD – PT harusnya tidak membuat mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama seperti saat ini dengan memasukan anak-anak pada agama yang dianut. Mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama sebaiknya bermuatan perbandingan agama. Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama, semua agama diajarkan secara bertahap kedalaman dan

keluasannya sesuai tingkatan pendidikan siswa sehingga semua siswa atau mahasiswa mengetahui semua ajaran, nilai, ritual dan perayaan semua agama. Dengan cara semacam ini akan memunculkan pemahaman menyeluruh oleh semua siswa tentang semua agama yang ada di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik semacam ini, diharapkan tidak terjadi prasangka buruk terhadap keyakinan orang lain. Dengan cara ini juga kehidupan bersama dengan kemajemukan beragama dapat tercapai karena seorang anak tahu secara jelas semua ajaran agama.

Realitas kurikulum di sekolah-sekolah Indonesia saat ini memaksa seorang anak bersifat eksklusif dengan agamanya saja dan melihat agama orang lain secara sepintas. Hal ini tergambar dalam buku-buku pelajaran Pendidikan Agama siswa yang salah memaparkan ajaran agama lain kepada peserta didik yang berakibat sejak belia anak-anak sudah salah memahami agama orang lain. Ada banyak bukti di mana buku pelajaran agama berisi informasi yang salah tentang agama lain (Batlolone, 2022). Implikasi ke depan bagi bangsa Indonesia dengan pola kurikulum semacam ini berbahaya sebab akan menimbulkan kesalahpahaman dan prasangka buruk akan agama lain. Ini dapat memicu konflik terbuka di kemudian hari.

Realitas lain yang bermasalah dalam sistem pendidikan di Indonesia yang menghalangi pemahaman hidup yang toleran dengan keberagaman adalah fenomena pemaksaan jilbab di sekolah oleh aturan yang dikeluarkan sekolah (Ardanareswari, 2021). Penyeragaman perbedaan agama dalam satu aturan yang dikeluarkan oleh sekolah selain membuat diskriminasi bagi kelompok minoritas namun ke depan akan membentuk polarisasi pemikiran dan stigma buruk dari kaum minoritas kepada kaum mayoritas dan sebaliknya dari kaum mayoritas merasa diri superior dari kaum mayoritas. Hal ini sangat tidak baik bagi kehidupan berbangsa di kemudian hari.

Fakta lain yang mengejutkan yang ditemukan di sekolah di Indonesia yakni guru melarang siswa minoritas untuk belajar agama atau melakukan aktivitas keagamaan dalam kerangka pelajaran agama di ruang-ruang sekolah (Tim, 2022). Pola pendidikan yang diskriminasi terhadap anak yang berbeda agama semacam ini adalah modal dasar bagi intoleransi di kemudian hari. Sekolah sebagai sebuah wadah pendidikan seyogyanya terbuka bagi semua yang berbeda malah memberikan

pedoman yang bertolak belakang dari realitas kemajemukan. Guru yang menjadi teladan sebaliknya memberikan contoh diskriminasi rasial bagi anak. Apa yang diperlihatkan oleh sekolah dan guru akan tertanam dalam benak siswa yang kemudian hari dapat saja reproduksi kembali nilai dan perilaku seperti yang ia terima. Jika anak memiliki kemampuan kritis, di kemudian hari mungkin tidak akan lakukan perilaku diskriminatif tersebut namun tidak ada jaminan hal tersebut terjadi.

Selain itu, ada berbagai contoh peraturan daerah yang diskriminatif kepada kelompok minoritas agama yang berbeda di Indonesia (Faqih, 2018). Perda berbasis agama, baik perda berdasarkan ajaran Islam maupun Kristen dan lainnya yang bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum oleh semua warga negara. Umat agama yang berbeda semestinya tidak mengikuti aturan semacam ini - hal ini menimbulkan diskriminasi hukum. Jika mengikutinya akan terjebak dalam pemaksaan hukum yang tidak ia yakini. Sangat dilematis namun ini ada di Indonesia saat ini. Mereka yang paling dikorbankan adalah anak-anak dan kaum muda yang dikemudian hari akan menjadi pemimpin bangsa. Model pendidikan dan politik identitas semacam ini seharusnya ditinggalkan agar kehidupan berbangsa di kemudian hari menjadi lebih baik.

Dalam konteks Kota Kupang sejauh ini belum terdengar terjadi diskriminasi dan pemaksaan agama dalam dunia pendidikan. Harapannya, hal ini tetap terpelihara dengan berbagai modal sosial dan budaya yang dimiliki masyarakat Kota Kupang dan NTT. Namun dalam konteks nasional, situasi kemajemukan sedang tidak baik-baik saja sebab sistem pendidikan di rumah, sekolah, pemerintahan dan yang sedang mengemuka, politik identitas sangat kentara dipertontonkan di muka umum melalui berbagai media dan media sosial. Jika hal ini tidak dihentikan, kedepan ke-Indonesiaan bisa retak dan anak-anak bangsa bisa masuk dalam konflik sektarian yang berkepanjangan dan meluluhlantakan negara bangsa ini.

Referensi

- Adhi, I. L. B. (2018). Di Balik Kontroversi Indeks Kota Toleran dari SETARA Institute. *Tirto.Id*, Politik. <https://tirto.id/di-balik-kontroversi-indeks-kota-toleran-dari-setara-institute-dbvq>
- Ardanawati, I. (2021). Pemaksaan Memakai Jilbab Saat Ini dan Pelarangan pada Era Orde Baru. *Tirto.Id*, Sosial Budaya. <https://tirto.id/pemaksaan-memakai-jilbab-saat-ini-dan-pelarangan-pada-era-orde-baru-f9Kb>
- Aziz, A. (2019). Pendayagunaan Kearifan Lokal untuk Kerukunan Umat Beragama: Pelajaran dari Nusa Tenggara Timur. In Kustini (Ed.), *Monografi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Monograf). Litbangdiklat Press. <https://balitbangdiklat.kemendagri.go.id/upload/files/MONOGRAFI%283%29.pdf>
- Batlolone, V. (2022). PGI Surati Mendikbudristek, Protes soal Buku Pelajaran SMP yang Keliru tentang Iman Kristen. *Kompas.Tv*, Nasional. <https://www.kompas.tv/article/313041/pgi-surati-mendikbudristek-protos-soal-buku-pelajaran-smp-yang-keliru-tentang-iman-kristen?page=all>
- BPS. (2021). *Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>
- Chyntia. (2021). *10 Kota dengan Toleransi Tertinggi 2020*. Indonesiabaik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/10-kota-dengan-toleransi-tertinggi-2020>
- Faqih, F. (2018). Perda Berbasis Agama Dinilai Rentan Diskriminasi. *Merdeka.Com*, News. <https://www.merdeka.com/peristiwa/perda-berbasis-agama-dinilai-rentan-diskriminasi.html>
- Liliweri, A. (2009). *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural* (2nd ed.). LKIS.
- LOCALISE SDGs in Indonesia. (2018). *Profil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. LOCALISE SDGs in Indonesia. <https://localisedsgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/17>
- Made, I. G., & Sena, W. (2020). Peran Umat Hindu Dan Kristen Di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Multikultural Dan Multireligius*, 19(1), 100–114.
- Permana, R. H. (2022). Singkawang Jadi Kota Paling Toleran versi Setara, Depok Terbawah. *Detiknews*, Berita. <https://news.detik.com/berita/d-6008606/singkawang-jadi-kota-paling-toleran-versi-setara-depok-terbawah>
- Riana, F. (2021). Laporan Indeks Kota Toleran 2020 Versi Setara: Salatiga Ranking Pertama. *Tempo.Co*, Nasional. <https://nasional.tempo.co/read/1436478/laporan-indeks-kota-toleran-2020-versi-setara-salatiga-ranking-pertama>
- S-20/BP/S-12/A-6/N-1. (1998). KELOMPOK ANARKIS DAN NIHILIS RACUN SANGAT BERBAHAYA.pdf. *Suara Karya*.
- Sodli, A. (2009). *PENELITIAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI NUSANTARA TENGGARA TIMUR (NTT)*. XVI(01), 64–73.
- Taopan, N. F., Ly, P., & Lobo, L. (2020). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama

Kupang. *Pendidikan Pancasila an Kewarganegaraan*, 1(1), 1–9. Peran, Forum Kerukunan Umat Beragama, Toleransi Beragama
Tim. (2022). SMAN 2 Depok Diduga Larang Siswa Rohani Kristen. *Peduli Bangsa*, News. <https://pedulibangsa.co.id/sman-2-depok-diduga-larang-siswa-rohani-kristen/>